

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN
KREDIT PADA PT BANK SUMUT MEDAN**

SKRIPSI

Oleh:

ROMAITO HUTAURUK

148330012



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2019

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

17/10/19

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan Penulisan Karya Ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA

Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit
Pada PT. Bank Sumut Medan
Nama : Romaito Hutauruk
NPM : 148330012
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Karlonta Nainggolan, Ak, MSA Drs. Halomoan Situmorang, Ak, MMA
Pembimbing I Pembimbing II


Ilham Ramadhan Nst, SE, AK, M.Si, CA Ilham Ramadhan Nst, SE, AK, M.Si, CA
Ka. Prodi Akuntansi

26 Februari 2019

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditentukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 26 Februari 2019



Komaito Hutauruk
148330012

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai aktivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Romaito Hutauruk
NPM : 148330012
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya berjudul : Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada PT. Bank Sumut Medan beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data(*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 26 Februari 2019
Yang menyatakan

(Romaito Hutauruk)
148330012

ABSTRAK

“ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA PEMBERIAN KREDIT PADA PT BANK SUMUT CABANG KOOR MEDAN”

Nama: ROMAITO HUTAURUK

NIM: 148330012

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan bukti nyata tentang sistem pengendalian intern pada pemberian kredit pada PT Bank Sumut Cabang Koor Medan. Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Bagian Pemberian Kredit dan Operasional di Kantor Bank Sumut Cabang Koor Medan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

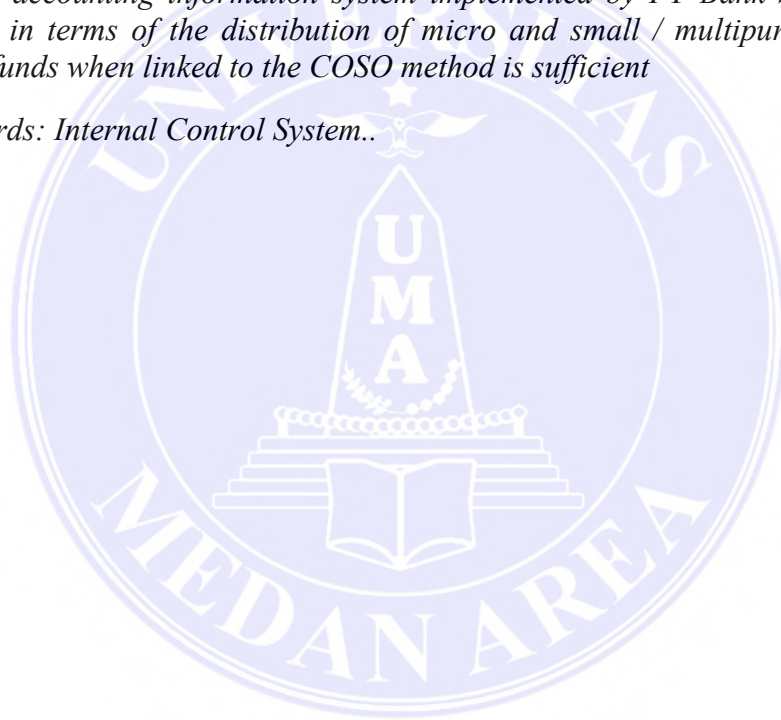
Sistem pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank Sumut Cabang Koor Medan sudah sesuai dengan standar sistem pemberian kredit. Pengendalian intern pada sistem pemberian kredit di Bank Sumut Cabang Koor Medan dalam komponen lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan sebagian besar sudah sesuai kecuali komponen lingkungan pengendalian. Penerapan sistem informasi akuntansi yang diterapkan pada Bank Sumut Cabang Koor Medan pada prakteknya mempunyai beberapa komponen untuk mendukung kehandalan sistem informasi yang sesuai teori. Sistem Informasi Akuntansi pengendalian internal yang diterapkan Bank Sumut Cabang Koor Medan dalam hal penyaluran dana Kredit Usaha mikro dan Kecil/Multiguna jika dihubungkan dengan metode COSO sudah memadai.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal.

This study aims to find out and get real evidence about the internal control system in credit granting in PT Bank Sumut Branch Medan. The type of research in this study is qualitative with a descriptive approach, while those who become informants in this study are the Division of Credit and Operations in PT Bank Sumut Branch Medan. The data analysis technique used in the research is data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

Credit granting system conducted by PT Bank Sumut Branch Medan is in conformity with the standards of credit delivery system. Internal control in the credit granting system in PT Bank Sumut Branch Medan in the control environment component, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring are mostly suitable except for the control environment component. The application of accounting information systems applied to PT Bank Sumut Branch Medan in practice has several components to support the reliability of information systems that fit the theory. The internal control accounting information system implemented by PT Bank Sumut Branch Medan in terms of the distribution of micro and small / multipurpose business credit funds when linked to the COSO method is sufficient

Keywords: Internal Control System..



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Allah Bapa dan anakNya Yesus Kristus atas segala berkat, kasih dan anugrah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : **“ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT PADA PT.BANK SUMUT MEDAN.**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan pendidikan di program Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam segi bentuk, isi, maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada pembaca untuk dapat memberikan pemikiran, kritik, maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr Dadan Ramadan, M.Eng, M.Sc
2. Bapak Dr. Ihsan Effendi, SE, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area
3. Bapak Hery Syahrial, SE, M.Si. Selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

4. Bapak Ilham Ramahdan Nst, SE, Ak, M.Si,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
5. Ibu Dra. Karlonta Nainggolan, Ak, MSA. selaku dosen pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga terselesainya skripsi ini.
6. Bapak Drs. Halomoan Situmorang , Ak, MMA. Selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Dra.Hj.Rosmaini Ak,MMA selaku sekretaris yang telah banyak meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan kearah yang lebih baik dan semangat semangat selama ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area
9. Pimpinan dan seluruh Karyawan perusahaan PT.Bank Sumut Medan memberikan izin kepada peneliti dalam melakukan penelitian serta memberikan data-data yang peneliti perlukan.
10. Teristimewa penulis ucapkan kepada orang tua saya yang sangat saya sayangi Ibunda Bapak sayah Posman Hutauruk dan ibu saya Esmina Situmean atas dukungan moril dan meteril serta doa yang penuh dengan kasih sayang dalam mendidik dan membimbing penulis. Terimakasih telah menjadi orang tua yang sangat luar biasa bagi saya.
11. Kakak Saya Rosa Sumarni Hutauruk dan Desi Ratnasari Hutauruk dan adik adik saya Ayuria Hutauruk, Saut Marulitua Hutauruk, Rosinta

Hutauruk dan Revi Marisyah Hutauruk, terimakasih telah Memberikan semangat dan memberikan motivasi selama ini kepada penulis.

12. Keluarga besar Hutauruk dan yang telah mendukung dan mendoakan penulis..
13. Teman – teman saya Rheka Anjelina saragih, Dian Utami Nainggolan, Gusniati Manik, Siska Desyanti Telambanua, Elpriani Sinaga S.Akun, dan yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan seluruh mahasiswa/i program studi akuntansi angkatan 2014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Terimakasih atas dukungan kalian semua.
14. Dan Teman Spesial saya Julwandi Primen Sianturi, Vera wati Hutauruk Terimakasih telah memberi semangat dan Motivasi selama ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai dan melindungi kita semua. Amin.....

Medan, Desember 2018

Penulis

Romaito Hutauruk

NPM: 148330012

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	IX
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Batasan Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern.....	7
2.1.1 Tujuan dan Fungsi Pengendalian Intern	8
2.1.2 Unsur Pengendalian intern.....	9
2.1.3 Komponen Pengendalian Intern	11
2.1.4 Komponen Pengendalian Internal COSO	12
2.1.5 Keterbatasan Dalam Pengendalian Intern.....	18
2.2 Pengertian Bank	19
2.3 Pengertian Kredit.....	22
2.3.1 Prinsip – Prinsip Pemberian kredit	29

2.3.2 Sistem Pemberian Kredit	33
2.4 Kredit Usaha Rakyat (KUR)	36
2.5 Penelitian Terdahulu	40
2.6 Kerangka Konseptual	43

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	44
3.2 Lokasi & Waktu Penelitian	44
3.3 Informan Penelitian	45
3.4 Sumber Data Penelitian	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data Penelitian	46
3.6 Teknik Analisis Data Penelitian	47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	48
4.1.1 Sejarah Singkat PT Bank Sumut	48
4.1.2 Makna logo Perusahaan.....	50
4.1.3 Visi Dan Misi.....	51
4.1.4 Statement Budaya Perusahaan ada PT Bank Sumut.....	51
4.1.5 Tujuan dan Fungsi Bank Sumut	52
4.1.6 Struktur Organisasi PT Bank Sumut Cabang koor Medan.....	52
4.2 Hasil Penelitian	61
4.2.1 Prosedur Penyaluran Dana kredit Usaha Mikro Dan kecil Di Bank Sumut Koor Medan	61
4.2.1.1 Alur Pemberian Kredit Usaha Mikro Dan Kecil DiBank Sumut Cabang Koor Medan	61

4.2.1.2 Bagian Dan Dokumen Pada PT. Bank Sumut Cabang Koor Demedan Yang Terkaid Dengan Kredit Usaha Mikro Dan Kecil.....	64
4.3 Pembahasan	66
4.3.1 Analisis Pengendalian Intern Pada Bank Sumut Medan	66
4.3.2 Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pada Prosedur Penyaluran Dana Kredit Usaha Mikro Dan Kredit Atau Multi Guna Pada PT. Bank Sumut Cabang Koor Medan	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Rincian Sektor Ekonomi KUR PT.Bank Sumut (Persero) Tahun 2017	3
Tabel I.2	Rincian Non Performing Loan Bank Sumut Tahun 2014- 2017	3
Tabel I.3	Rician Non Performing Loan Bank Barkyat Indonesia Tbk Tahun 2012-2017.....	4
Tabel II.4	Penelitian Terdahulu	40
Tabel III.5	Rencana Waktu Penelitian	45
Tabel IV.6	Rangkuman Analisis Pelaksanaan Pengendalian Intern Pada Proses Pemberian Kredit Berdasarkan Pengendalian COSO Pada Kompnen Lingkungan Pengendalian	70
Tabel IV.7	Rangkuman Analisis Pelaksanaan Pengendalian Intern Pada Proses Pemberian Kredit Berdasarkan Pengendalian COSO Pada Komponen Penilaian Resiko	72
Tabel IV.8	Rangkuman analisis Pelaksanaan Pengendalian Intern Pada Proses Pemberian Kredit Berdasarkan Pengendalian COSO Pada Komponen Anktivitas Pengendalian	74
Tabel IV.9	Rangkuman Analisis Pelaksanaan Pengendalain Intern Pada Proses Pemberian Kredit Berdasarkan Pengendalian COSO Pada Komponen Informasi dan Komunikasi	76
Tabel IV.10	Rangkuman Analisis Pelaksanaan Pengendalian Intern Pada Proses Pemberian Kredit Berdasarkan Pengendalian COSO Pada Komponen Pemantauan/ Pengawasan	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar	II.1	Kerangka Konseptual	43
Gambar	IV.2	Logo PT. Bank Sumut	50
Gambar	IV.3	Struktur Organisasi Bank Sumut Koor Cabang	53
Gambar	IV.4	Alur Pemberian Kredit Multiguna	63
Gambar	IV.5	Flowchart Pemberian Kredit	69



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran perbankan dalam mewujudkan perekonomian suatu negara sangatlah penting. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa dari perbankan, baik dari perorangan maupun lembaga, baik sosial maupun perusahaan. Sebagai suatu lembaga keuangan yang berorientasi pada bisnis, perbankan mempunyai kegiatan pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat luas, kemudian dana yang berhasil dihimpun disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu *credere* yang berarti kepercayaan. Makna dari kata kredit tersebut menunjukkan bahwa dasar dari pemberian kredit adalah berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan ini berarti bahwa seseorang atau badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di kemudian hari sanggup untuk memenuhi segala sesuatu yang telah menjadi perjanjian di antara kedua belah pihak.

Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menyebutkan bahwa realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan Desember 2017 mencapai Rp95.56 Triliun atau 89.6% dari target tahun 2017 sebesar Rp108 Triliun. Target tersebut ditujukan untuk debitur sebanyak 4.408.925 orang melalui 36 lembaga keuangan atau perbankan (sumber: www.tirto.id). Berdasarkan hasil tersebut juga diperoleh informasi bahwa kecenderungan lembaga keuangan atau perusahaan menyalurkan KUR kepada usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, karena tingkat kredit macetnya

(*Non Performing Loan*) lebih kecil dibandingkan usaha yang bergerak pada sektor produksi.

Banyak bank yang menyediakan pinjaman modal usaha, salah satunya adalah Bank Sumut. Bank Sumut memiliki komitmen untuk memberikan kemudahan penyaluran kredit sebagai tambahan modal usaha bagi pengusaha mikro dan kecil. Bentuk pinjaman modal dinamakan dengan Kredit Mikro dan Kecil. Modal usaha ini merupakan fasilitas kredit yang dapat diberikan kepada semua pemilik usaha mikro dan kecil, usaha rumah tangga baik berbentuk perusahaan, kelompok usaha, dan perorangan (seperti pedagang, petani, peternak, pengrajin dan nelayan). Kunci sukses pemberian kredit Bank Sumut adalah cepat, sederhana dan kedekatan hubungan. Cepat diartikan cepat dalam pencairan guna memenuhi tuntutan bisnis dengan putaran dana yang tinggi. Sederhana diartikan sebagai administrasi dan persyaratan mudah dipenuhi. Sedangkan kedekatan hubungan diartikan diprioritaskan dari daerah setempat dimana unit mikro dan kecil beroperasi. Pada tahun 2017 Bank Sumut mampu menyalurkan KUR sebanyak Rp11.237 Milliar atau 61.05% dari jumlah total kredit tahun tersebut, hasil tersebut jauh meningkat dari tahun 2016 yang hanya mencapai Rp6.988 Milliar atau 39.63% dari jumlah kredit di Bank Sumut (Sumber: Annual Report Bank Sumut Tahun 2017).

Adapun sektor ekonomi yang menjadi objek penyaluran kredit KUR pada Bank Sumut pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel I.1

Rincian Sektor Ekonomi KUR PT Bank Sumut (Persero) Tahun 2017

Sektor Ekonomi	Kelompok Sektor	Alokasi KUR
Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	Produksi	50%
Kelautan dan Perikanan	Produksi	
Industri Pengolahan	Produksi	
Jasa Produksi	Produksi	
Perdagangan	Non-Produksi	50%

Sumber: Annual Report Bank Sumut Tahun (2017)

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh informasi bahwa Bank Sumut memberikan porsi yang sangat besar kepada usaha yang bergerak di bidang perdagangan yang disebabkan oleh tingkat *Non Performing Loan* yang jauh lebih rendah dibandingkan sektor usaha lain. Berikut ini adalah nilai NPL dari Bank Sumut dari Tahun 2017.

Tabel I.2

Rincian Non Performing Loan Bank Sumut Tahun 2014-2017

No	Perusahaan	Tahun	NPL (%)
1	Bank Sumut	2014	5.5
		2015	5.0
		2016	4.7
		2017	4.4

Sumber: Pefindo (2018)

Berdasarkan tabel 1.3 diatas diperoleh informasi bahwa tingkat NPL di Sumut cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2014-2017, hal tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan kredit dan pengendalian internal atas penyeluran kredit dilaksanakan cukup baik. Namun jika dibandingkan dengan tingkat NPL yang dimiliki oleh Bank BRI Tbk, tingkat NPL dari Bank Sumut masih lebih tinggi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai NPL Bank BRI Tbk tahun 2012-2017 yang masih rata-rata berada pada level 2%, berikut ini adalah njlai NPL Bank BRI Tbk.

Tabel I.3
Rincian *Non Performing Loan* Bank Rakyat Indonesia Tbk Tahun 2012-2017

No	Perusahaan	Tahun	NPL (%)
1	Bank BRI Tbk	2012	1.833
		2013	1.678
		2014	1.777
		2015	2.1
		2016	2.1
		017	2.2

Sumber: Pefindo (2018)

Tingkat NPL Bank Sumut dari tahun 2016 mengalami penurunan tahun 2017 namun belum mampu mencapai tingkat 2% seperti yang terjadi pada Bank BRI. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa terdapat maka sangat perlu peningkatan pengendalian internal pemberian kredit di Bank Sumut. Sedangkan pada NPL Bank Sumut Cabang Koor Medan mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu sebesar 5.62% dan pada tahun 2017 sebesar 6.01%. hasil tersebut mengindikasikan bahwa terdapat masalah dalam pelaksanaan pengendalian internal pemberian kredit yang berdampak terhadap tingkat NPL.

Adapun permasalahan pemberian kredit yang terjadi di PT Sumut Cabang Koor. Medan adalah terjadinya penipuan terhadap identitas calon nasabah yang bekerjasama dengan oknum karyawan PT Sumut Cabang Medan yang berakibat terhadap nasabah tersebut mengalami gagal bayar atau penunggakan pembayaran kredit. Fenomena kemudahan pemberian kredit pada Bank Sumut menimbulkan sebuah masalah, yaitu apakah Bank Sumut telah melaksanakan prinsip kehati-hatian sesuai kebijakan perkreditan Bank Indonesia. Dan untuk mengetahui apakah pelaksanaan proses pemberian kredit mikro kepada calon debitur pada Bank Sumut telah sesuai dengan sistem pengendalian intern yang ada pada Manual Kredit Mikro Bank Sumut dan unsur-unsur dalam *Committe Of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO)*, maka perlu

dilakukan evaluasi pada proses pemberian kredit mikro tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mencoba membahas dan menganalisa sistem pengendalian intern pada proses pemberian kredit mikro dan kecil yang dilaksanakan pada Bank Sumut dengan judul: “*Analisis Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Kredit Pada PT Bank Sumut Cabang Koor. Medan.*”

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka untuk mempertajam dan memfokuskan analisis permasalahan tentang pengendalian internal pemberian kredit di Bank Sumut Cabang Koor. Medan, maka peneliti memutuskan untuk khusus meneliti tentang pemberian kredit usaha rakyat (KUR) mikro dan kecil.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem Pengendalian Intern Pada Proses Pemberian Kredit telah diterapkan pada PT Sumut Cabang Koor. Medan?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan penelitian, antara lain:

1. Menganalisis sistem Pengendalian Intern Pada Proses Pemberian Kredit telah diterapkan pada PT Sumut Cabang Koor. Medan

1.5 Manfaat Penelitian

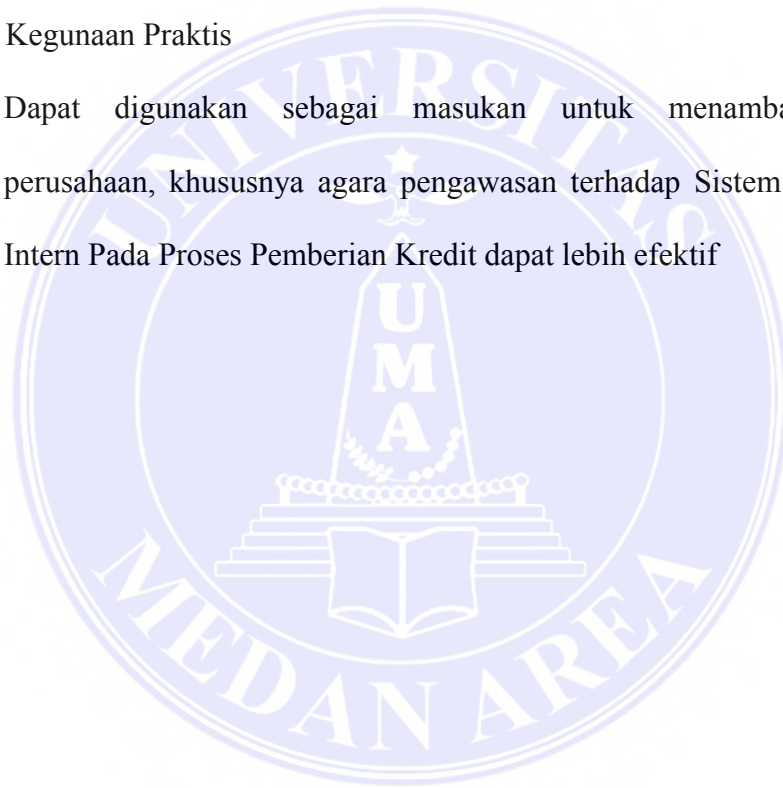
Penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis dan praktis, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pada Proses Pemberian Kredit pada *PT Bank Sumut Cabang Koor. Medan*

2. Kegunaan Praktis

Dapat digunakan sebagai masukan untuk menambah kemajuan perusahaan, khususnya agara pengawasan terhadap Sistem Pengendalian Intern Pada Proses Pemberian Kredit dapat lebih efektif



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern sangat diperlukan didalam suatu perusahaan karena apabila perusahaan telah memiliki pengendalian intern yang baik maka akan meminimalkan segala bentuk kesalahan ataupun penyelewengan terhadap kas di perusahaan tersebut. Untuk itu pentingnya pengendalian intern yang harus diterapkan pada setiap perusahaan.

Menurut Romney dan Steinbart (2004:229), mendefenisikan pengendalian intern sebagai “Rencana organisasi dan metode bisnis yang digunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan handal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan”.

Sedangkan menurut Mulyadi (2008:163), sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Berdasarkan defenisi pengendalian intern diatas, bahwa benarlah defenisi sistem pengendalian intern menekankan pada tujuan yang hendak dicapai yaitu menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi yang dikoordinasikan sedemikian rupa, mendorong

efektifitas dan efisiensi operasional serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

2.1.1 Tujuan dan Fungsi Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern perlu diterapkan di dalam suatu perusahaan agar dapat membantu pimpinan supaya perusahaan dapat mencapai tujuan secara efisien. Adapun tujuan pengendalian intern menurut Arens & Loebbecke (2009:258) adalah sebagai berikut:

1. Keandalan Laporan Keuangan

Manajemen perusahaan bertanggung jawab dalam menyiapkan laporan keuangan bagi investor, kreditur dan pengguna lainnya. Manajemen mempunyai kewajiban hukum dan profesional untuk menjamin bahwa informasi telah disiapkan sesuai standar laporan, yaitu prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2. Mendorong efektifitas dan efisiensi operasional

Pengendalian dalam suatu perusahaan atau organisasi adalah alat untuk mencegah kegiatan dan pemborosan yang tidak perlu dalam segala aspek usaha dan untuk mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan efisien.

3. Ketaatan pada hukum dan peraturan

Pengendalian internal yang baik tidak hanya menyediakan seperangkat peraturan lengkap dan sanksinya saja, tetapi pengendalian internal yang baik, akan mampu mendorong setiap personal untuk dapat mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan dan berkaitan erat dengan akuntansi.

Menurut Marshall B. Romney & Paul John Steinbart (2004:229), pengendalian internal melaksanakan 3 fungsi penting, yaitu:

1. Pengendalian untuk pencegahan (*preventive control*), yaitu mencegah timbulnya suatu masalah, akan tetapi tidak semua masalah mengenai pengendalian dapat dicegah.
2. Pengendalian untuk pemeriksaan (*detective control*), yaitu untuk mengungkapkan masalah ketika masalah tersebut muncul.
3. Pengendalian korektif (*corrective control*), yaitu untuk memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian untuk pemeriksaan.

2.1.2 Unsur Pengendalian Intern

Unsur-unsur dalam pengendalian intern merupakan cara perusahaan untuk mencapai tujuan pengendalian intern yang baik. Menurut Mulyadi (2008:164) ada beberapa unsur pokok pengendalian intern, yaitu:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya.

Berdasarkan kutipan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi harus adanya batas yang jelas dalam wewenang dan tanggung jawab, adanya pemisahan yang tegas antara fungsi operasi, fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan suatu perusahaan, dimana suatu fungsi tidak boleh diberikan tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan utang, pendapatan dan biaya. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, penggunaan formulir harus diawasi sedemikian rupa guna mengawasi pelaksanaan otorisasi. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam dalam formulir dicatat dalam catatan akuntansi. Dengan demikian, sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya serta prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan dan biaya suatu organisasi.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya. Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian intern yang penting. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien meskipun hanya sedikit unsur sistem pengendalian intern yang mendukungnya.

2.1.3 Komponen Pengendalian Intern

Pengendalian intern yang baik harus memenuhi beberapa kriteria ataupun komponen (Agoes, 2012:100-102). Pengendalian intern terdiri dari lima unsur yang saling berkaitan. Lima komponen pengendalian intern tersebut adalah :

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian merupakan suatu fondasi dari semua komponen pengendalian internal lainnya yang bersifat disiplin dan berstruktur.

2. Penilaian Resiko (*Risk Assessment*)

Merupakan suatu kebijakan dan prosedur yang dapat membantu suatu perusahaan dalam meyakinkan bahwa tugas dan perintah yang diberikan oleh manajemen telah dijalankan.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Merupakan suatu kebijakan dan prosedur yang dapat membantu suatu perusahaan dalam meyakinkan bahwa tugas dan perintah yang diberikan oleh manajemen telah dijalankan.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Merupakan pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawabnya.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan merupakan suatu proses yang menilai kualitas kerja pengendalian internal pada suatu waktu. Pemantauan melibatkan penilaian rancangan dan pengoperasian pengendalian dengan dasar waktu dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan.

2.1.4 Komponen Pengendalian Internal COSO

Sebuah organisasi nirlaba independen yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui etika dan pengendalian internal yang efektif disebut dengan *Committee Of Sponsoring Organization of The Treadway Commission* (COSO), dibentuk pada tahun 1985.

Sebagai kelanjutan dari rekomendasi *Treadway Commission* (*Nasional Commission on Fraudulent Financial Reporting*), pada tahun 1990 COSO (*Committee of Sponsoring Organization*) mengeluarkan laporan yang berisi kerangka integral pengendalian internal. Konsep yang dikemukakan oleh COSO ini selanjutnya menjadi pengembangan pemahaman auditor terhadap pengendalian internal klien, dan sudah diatur dalam Standart Profesional Akuntan Publik 2001 SA 319 (Halim A, 2015: 212).

Komponen pengendalian internal menurut *The Committee of sponsoring Organizations* (COSO) ada 5 yaitu (Halim, 2015: 213) :

1. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian

orang-orangnya. Lingkungan pengendalian menyediakan arahan bagi organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orang yang ada didalam organisasi tersebut. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal, menyediakan disiplin dan struktur. Menurut (Elder *et al*, 2013: 322) beberapa faktor yang berpengaruh dalam lingkungan pengendalian antara lain:

- a. Komitmen kepada integritas dan nilai etika. Penting bagi manajer untuk menciptakan budaya organisasi yang menekankan pada nilai integritas dan nilai-nilai etika. Perilaku etis atau tidak etis manajer dan karyawan berdampak besar terhadap keseluruhan pengendalian internal.
- b. Filosofi dan gaya operasi manajemen. Manajer harus mengambil tindakan aktif untuk menjadi contoh berperilaku etis dengan bertindak sesuai dengan kode etik personal. Manajer juga bertanggung jawab menyusun kode etik perusahaan dan memperlakukan karyawan adil dan hormat.
- c. Komitmen terhadap kompetensi. Perusahaan harus merekrut karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya guna mendorong kreatifitas, inisiatif dalam menghadapi kondisi yang dinamis.
- d. Partisipasi komite audit dan dewan direksi. Dewan direksi bertanggung jawab untuk memilih komite audit yang

beranggota orang-orang luar dari perusahaan. Peran komite audit adalah memantau akuntansi perusahaan serta praktik dan kebijakan pelaporan keuangan.

e. Struktur organisasi. Perusahaan menggambarkan pembagian otoritas dan tanggung jawab perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

f. Kebijakan dan praktis sumber daya manusia. Kegiatan sumber daya manusia meliputi perekrutan karyawan baru, orientasi karyawan baru, pelatihan karyawan, motivasi karyawan, evaluasi karyawan, promosi karyawan, kompensasi karyawan, perlindungan karyawan dan pemberhentian karyawan.

2. Penaksiran risiko. Penentuan risiko untuk pelaporan keuangan mencakup identifikasi, analisis, dan manajemen risiko yang berkaitan dengan penyiapan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Proses penaksiran resiko entitas mempertimbangkan kejadian eksternal dan internal serta situasi yang mampu mempengaruhi kesanggupan manajemen untuk melakukan prosedur akuntansi yang konsisten dengan arsesi manajemen dalam pada laporan keuangan. Sekali risiko dapat diidentifikasi, manajemen mempertimbangkan signifikan atau tidaknya, kemungkinan terjadinya dan bagaimana hal itu akan dikelola. Menurut (Elder *et al*, 2013: 325) semua perusahaan, baik besar maupun kecil pasti

menghadapi resiko internal maupun eksternal dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. Resiko itu bersumber dari: a. Tindakan tidak sengaja; b. Tindakan sengaja; c. Bencana alam atau kerusuhan politik; d. Kesalahan perangkat lunak dan kegagalan peralatan Komputer.

3. **Aktivitas Pengendalian.** Menurut (Elder *et al*, 2013: 326) aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktifitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan diberbagai tingkat organisasi, fungsi, dan pemrosesan data, serta diintegrasikan dalam komponen-komponen pengendalian lainnya. Aktivitas pengendalian mencakup pemisahan tugas, pengendalian pengolahan informasi, pengendalian fisik, review kinerja.
4. **Informasi dan komunikasi.** Menurut (Elder *et al*, 2013: 331) Organisasi memerlukan informasi relevan yang disediakan oleh orang disaat yang tepat. Selain itu informasi harus pula andal dalam akurasi dan kelengkapannya. Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang mencakup sistem akuntansi, terdiri dari metode, catatan yang dibangun untuk mencatat, mengelolah, meringkas, melaporkan dan untuk menyelenggarakan akuntabilitas terhadap aktiva, utang, ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem

berdampak pada kemampuan manajemen untuk mengambil keputusan, mengendalikan aktivitas entitas dan menyusun laporan keuangan yang andal.

5. Pemantauan. Menurut (Elder *et al*, 2013: 333) pemantauan adalah proses penetapan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Berkenaan dengan penilaian efektivitas pengendalian internal secara terus menerus atau periodik oleh manajemen, untuk melihat apakah telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaan. Tujuan dari pemantauan untuk menentukan apakah pengendalian masih berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau perlu adanya perbaikan. Pemantauan mencakup penentuan desain, operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Menurut Hadi dan Rahayu (2014) kegiatan utama dalam pengawasan kinerja meliputi:
 - a. Supervisi yang efektif meliputi pelatihan karyawan, memonitor kinerja karyawan, mengkoreksi kesalahan yang dilakukan, serta mengamankan harta dengan mengawasi karyawan yang memiliki akses terhadap perusahaan.
 - b. Akuntansi pertanggung jawaban
 - i. Penyusunan anggaran, kouta, penjadwalan, harga pokok standart, dan standart kualitas.
 - ii. Laporan kinerja yang membandingkan kinerja aktual dengan rencana, dan menginformasikan jika ada penyimpangan yang signifikan.

- iii. Prosedur untuk investigasi penyimpangan yang signifikan dan mengambil tindakan untuk mengoreksi kondisi yang menyebabkan terjadinya penyimpangan.
- c. Pengauditan internal
 - i. Review terhadap realibilitas dan integritas informasi operasional dan informasi finansial.
 - ii. Penilaian terhadap efektifitas pengendalian internal
 - iii. Evaluasi kepatuhan karyawan terhadap kebijakan, prosedur manajemen dan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku
 - iv. Evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi manajemen.

2.1.5 Keterbatasan Dalam Pengendalian Intern

Keterbatasan-keterbatasan tersebut menurut Mulyadi (2008 : 181) adalah:

1. Kesalahan dalam pertimbangan

Kesalahan dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin yang biasanya dilakukan oleh manajemen atau personel lain. Kesalahan ini dapat disebabkan oleh tidak memadainya informasi yang diterima, keterbatasan waktu dan tekanan lain.

2. Gangguan

Adanya kekeliruan dalam memahami perintah, terjadinya kesalahan karena kelalaian dan perubahan yang bersifat sementara

atau permanen dalam personil atau dalam sistem dan prosedur yang diterapkan.

3. Kolusi

Kerja sama antara pihak-pihak yang terkait yang mana seharusnya antara pihak-pihak tersebut saling mengawasi, tetapi malah saling bekerja sama untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang dibuat baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

4. Pengabaian oleh manajemen

Manajemen mengabaikan kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan semata-mata untuk kepentingan pribadinya sehingga pengendalian internal tidak berfungsi secara baik.

5. Biaya atau manfaat

Biaya yang telah dikeluarkan untuk penerapan pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari adanya penerapan pengendalian internal tersebut.

2.2 Pengertian Bank

Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Selain itu berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, terdapat dua jenis bank yang terdiri dari :

1. Bank Umum

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Adapun pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut (Kasmir, 2014: 32):

1. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasionalnya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum juga sering disebut bank komersil (*commercial bank*).
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibanding dengan kegiatan bank umum.

Dari pengertian di atas dapat dilihat adanya bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah (Kasmir, 2014: 36) :

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini berorientasi pada prinsip konvensional hal ini dikarenakan sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di bawa oleh kolonial Belanda. Keuntungan utama dari bisnis perbankan berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari

selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan.

2. Bank yang berdasarkan prinsip syariah. Bank berdasarkan prinsip syariah menggunakan aturan-aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Bank Syariah umumnya tidak mengenal adanya bunga tetapi prinsip bagi hasil.

Produk-produk yang dihasilkan bank antara lain (Dendawijaya,2008:

27) :

1. Giro adalah simpanan dari pihak ketiga atau nasabah kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
2. Tabungan adalah simpanan-simpanan dalam rupiah atau valuta asing milik pihak ketiga bukan bank pada bank yang bersangkutan, termasuk kantornya di luar negeri, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.
3. Deposito adalah simpanan pihak ketiga atau nasabah kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antar pihak ketiga dan bank yang bersangkutan. Deposito dapat dibedakan sebagai berikut :
 - a. Deposito berjangka adalah deposito yang dibuat atas nama dan tidak dapat dipindahtangankan.

- b. Sertifikat deposito adalah deposito yang diterbitkan atas tunjuk dan dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan serta dapat dijadikan jaminan bagi pemohonan kredit.
 - c. *Deposit on call* adalah sejenis deposito berjangka yang pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu asalkan memberitahukan bank dua hari sebelumnya.
4. Kredit adalah uang (bantuan) yang diberikan oleh bank kepada debitur berdasarkan persetujuan atau perjanjian, sehingga debitur berkewajiban memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan kesepakatan.
 5. Jasa –jasa perbankan lainnya adalah berupa jasa-jasa dalam perbankan meliputi pasar uang, kegiatan *foreign exchange* yaitu kegiatan bank dalam melakukan pertukaran atau jual beli mata uang asing atau valuta asing (valas), kegiatan pasar modal dan layanan broker yaitu memberikan layanan jasa bank kepada nasabah untuk melakukan jual beli saham, obligasi, sertifikat reksadana dan surat berharga lainnya di bursa efek.

2.3 Pengertian Kredit

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit sudah tidak asing lagi, istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Oleh karena itu dasar kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima debit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah di janjikan.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 “kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga” (Kasmir,2014: 85). Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Kasmir,2014: 87) :

1. Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun dari ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.
2. Kesepakatan. Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsurs kesepakatan antar si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
3. Jangka waktu. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Risiko. Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.
5. Balas jasa Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasa ditentukan dengan bagi hasil.

Pemberian fasilitas kredit juga mempunyai tujuan-tujuan yang tidak terlepas dari misi bank antara lain (Kasmir,2014: 88) :

1. Mencari keuntungan. Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit dalam bentuk bunga yang diterima bank sebagai balas jasa dn biaya administrasi kredit yang dibebankan oleh nasabah.
2. Membantu usaha nasabah. Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.
3. Membantu Pemerintah. Semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di

berbagai sektor. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarkan pemberian kredit adalah :

- a. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- b. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
- d. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemati devisa negara.
- e. Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Kemudian disamping tujuan di atas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang. Jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna sehingga adanya kredit maka uang tersebut menjadi untuk menghasilkan barang atau jasa oleh debitur.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Dalam hal ini kredit perbankan dapat meningkatkan uang kartal sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang pula.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang. Kredit yang diberikan bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang menjadi berguna dan bermanfaat.
4. Untuk meningkatkan peredaran barang. Kredit juga dapat memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga dapat meningkatkan jumlah barang yang beredar.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi. Dengan adanya kredit yang diberikan akan membantu jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian kredit dapat pula membantu dalam proses ekspor sehingga dapat meningkatkan devisa negara.
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha. Kredit yang diberikan bank akan dapat mengatasi kekurangan permodalan dari para debitur terutama pengusaha sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.
7. Meningkatkan pendapatan. Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika suatu kredit disalurkan untuk membangun pabrik maka dapat membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional. Dalam hal kredit internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara kreditur dan debitur sehingga dapat mendorong adanya kerjasama di bidang lainnya.

Kredit yang diberikan oleh bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain (Kamir,2014: 90) :

1. Dilihat dari segi kegunaan
 - a. Kredit Investasi. Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.
 - b. Kredit modal kerja. Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
2. Dilihat dari segi tujuan kredit
 - a. Kredit produktif. Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
 - b. Kredit konsumtif. Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang atau jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
 - c. Kredit perdagangan. Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan

yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah. Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.

c. Kredit jangka panjang merupakan kredit yang jangka waktu pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan. Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

b. Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

- a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.
- b. Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek sebagai usaha peternakan.
- c. Kredit industri, yaitu kredit untuk untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.
- d. Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang.
- e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk mahasiswa.
- f. Kredit profesi, diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.
- g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah.

2.3.1 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah

menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P. Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5 C kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2014: 95) :

1. *Character*. Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.
2. *Capacity* Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikn kredit yang disalurkan.
3. *Capital*. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. *Collateral*. Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
5. *Condition*. Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut :

1. *Personality* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
2. *Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
3. *Purpose* yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan

pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya.

4. *Prospect* yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.
5. *Payment* merupakan ukuran bagaimana cara debitur mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
6. *Profitability* untuk menganalisis bagaimana kemampuan debitur dalam mencari laba yang dapat diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
7. *Protection* tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.3.2 Sistem Pemberian Kredit

Sistem pemberian kredit bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses pengajuan kredit bagi para nasabah, serta memberi pedoman yang jelas atas syarat-syarat pengajuan kredit tersebut.

1. Tugas dan Tanggungjawab (Mudrajat Kuncoro, 2009:99-109)

- a. Seksi Administrasi Kredit. Tugas dari seksi administrasi kredit adalah mengadministrasikan dokumen-dokumen pinjaman mulai dari proses permohonan kredit sampai kredit tersebut lunas.
- b. Seksi Analisis Kredit. Tugas utama dari seksi analisis kredit ini adalah melakukan analisis atas permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah berdasarkan informasi-informasi yang berkaitan dengan usaha nasabah baik yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai instansi yang berkaitan dengan usaha calon nasabah dan status hukumnya.
- c. Seksi Monitoring Kredit. Tujuan utamanya adalah memonitor perkembangan usaha dan ketepatan membayar bunga dan angsuran pokok kredit.
- d. Seksi Asuransi. Tugas utamanya adalah melakukan administrasi kredit yang diasuransikan baik asuransi jaminan kredit, asuransi jiwa, debitemnya, maupun asuransi kreditnya sendiri.
- e. Seksi Penagihan Tunggal. Tugas utamanya adalah melakukan administrasi terhadap kredit-kredit yang sudah macet.
- f. Bagian Pelayanan Dana dan Jasa. Tugas utamanya adalah memberikan pelayanan kepada nasabah/calon nasabah yang akan menggunakan produk dan jasa dengan memberikan

informasi yang diperlukan oleh nasabah berkaitan dengan produk dan jasa yang akan dipergunakan.

- g. Bagian Pelayanan Pinjaman/Kredit. Tugas utamanya adalah memberikan pelayanan dalam hal pencairan kredit, angsuran kredit, perhitungan bunga dan sebagainya.
- h. Bagian Kasir/Teller. Tugas utama dari bagian ini adalah memberikan pelayanan kepada nasabah dalam hal penarikan maupun penyetoran uang.
- i. Bagian Akuntansi. Tugas-tugas bagian akuntansi meliputi :
 - i. Mencetak laporan-laporan keuangan, antara lain neraca dan laba rugi.
 - ii. Melakukan verifikasi atas transaksi pembukuan berdasarkan bukti-bukti pembukuan yang ada.
 - iii. Memastikan bahwa semua kegiatan bagian operasional telah dibukukan pada hari tersebut.

1. Dokumen Pemberian Kredit

- a. Dokumen permohonan kredit, dokumen ini merupakan formulir yang harus diisi oleh nasabah apabila akan mengajukan kredit yang biasanya berisikan alasan mengapa nasabah akan mengajukan kredit.
- b. Dokumen analisis kredit, merupakan dokumen untuk melakukan proses analisa kredit yang biasanya dilakukan melalui proses survei kepada nasabah.

- c. Dokumen putusan kredit, merupakan hasil dari analisa kredit yang berisi keputusan akan diterima atau ditolaknya suatu pengajuan kredit tersebut.
- d. Dokumen jaminan kredit, merupakan barang jaminan yang digunakan oleh nasabah untuk mengajukan permohonan kredit.
- e. Dokumen pengikat jaminan kredit, merupakan surat yang dibuat untuk sebagai bukti atas barang jaminan yang dijamin oleh nasabah dalam pengajuan kredit.
- f. Dokumen pencairan kredit, merupakan dokumen yang berisikan keterangan bahwa pengajuan kredit telah disetujui dan akan dicairkan.
- g. Dokumen perjanjian kredit, dokumen ini dibuat setelah ada persetujuan pencairan kredit. Dokumen ini mengatur tentang pasal-pasal antara nasabah dengan pihak bank dan nasabah berkewajiban membayar kembali pinjaman berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh kedua pihak.

3. Proses Pemberian Kredit

- a. Tahap kegiatan prakara dan permohonan kredit. Permohonan kredit harus diajukan secara tertulis dan menggunakan format yang telah ditentukan dengan menggunakan dokumen permohonan dari lembaga pemberi kredit. Atas permohonan tersebut, lembaga pemberi kredit akan melakukan penelitian apakah permohonan tersebut diterima atau ditolak.

- b. Tahapan analisis dan evaluasi kredit. Analisis dan evaluasi kredit dituangkan dalam format yang telah ditetapkan. Dalam analisis tersebut sekurang-kurangnya mencakup informasi sebagai berikut:
- i. Identitas pemohon
 - ii. Tujuan permohonan kredit
 - iii. Riwayat hubungan bisnis dengan lembaga pemberi kredit
 - iv. Analisis 5C kredit
- c. Tahapan pemberian rekomendasi kredit. Rekomendasi kredit dibuat oleh pejabat perekonomian kredit berdasarkan analisis/evaluasi yang dibuat oleh penganalisis kredit. Rekomendasi kredit merupakan suatu kesimpulan dari analisis dan evaluasi atas proposal kredit yang disajikan oleh pejabat analisis kredit. Apabila perekomendasi telah merasa yakin atas rekomendasinya serta kelengkapan dokumennya, selanjutnya menyerahkan dokumen kredit tersebut kepada pejabat pemutus dan mempertahankan pendapatnya bila diperlukan.
- d. Tahap pemberian putusan kredit. Pemberian putusan kredit tersebut harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan harus dilakukan secara tertulis dan dibuktikan dengan memberikan tandatangan pada formulir putusan kredit. Apabila putusan kredit telah diberikan, selanjutnya dokumen kredit

diserahkan kepada administrasi kredit untuk dipersiapkan dokumen lainnya, seperti :

- i. Surat penawaran putusan kredit, surat ini memuat struktur dan tipe kredit serta syarat-syarat dan ketentuan kredit yang harus dipenuhi oleh nasabah. Dalam surat penawaran tersebut harus
- ii. dicantumkan batas waktu kepada nasabah untuk memberikan persetujuan atau penolakan.
- iii. Dokumen perjanjian kredit, perjanjian kredit memuat unsur-unsur perjanjian yang dikehendaki seperti yang tertuang dalam putusan kredit dan memuat agunan yang diberikan dan pengikatannya.
- iv. Dokumen untuk pencairan, dokumen pencairan kredit merupakan pengikat nasabah dengan bank yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak.

2.4 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pengertian KUR adalah “kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, Menengah-Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif”.

KUR adalah skema kredit atau pembiayaan modal kerja atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi

(UMKMK) di bidang usaha produktif yang usahanya layak namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan (belum *bankable*). Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program yang termasuk dalam Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil (Aulia, 2017).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menerangkan kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa:”Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Kriteria usaha kecil dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000(dua milyar lima ratus rupiah)

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan pengertian Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria usaha menengah dalam Pasal 6 ayat (3) adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM-K yang *feasible* tapi belum *bankable*. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi

(UMKM-K) yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan, dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Peluncuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya nota kesepahaman bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan kepada UMKM-K antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Perusahaan Penjamin (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan (BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BNI, BTN, dan Bank Syariah Mandiri). KUR ini didukung oleh Kementerian Negara BUMN, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, serta Bank Indonesia (Wardhani, 2010).

Landasan operasional KUR adalah Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR dan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Departemen Teknis, Perbankan dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007. Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 dalam hal usaha mikro, kecil dan menengah, Pemerintah memiliki program untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kredit usaha rakyat. Tindakan yang dilakukan adalah evaluasi pelaksanaan KUR, perluasan bank pelaksana, dan penyaluran KUR melalui lembaga keuangan mikro, sasarannya adalah KUR yang tersalur dari perbankan semakin meningkat sebagai alternatif sumber pembiayaan UMKM (Wardhani, 2010).

Sejak diluncurkan oleh pemerintah pada tanggal 5 November 2007, KUR ditawarkan dengan berbagai pilihan, yaitu: (Wardhani, 2010)

1. KUR s/d Rp500 Juta
2. KUR (Mikro) s/d Rp5 Juta
3. KUR *Linkage Program*

Dalam upaya penyaluran KUR selalu dihadapkan oleh kendala, seperti sulitnya memperoleh calon debitur yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh bank dan kerjasama dengan lembaga penjamin masih belum jelas. Sedangkan pada sisi UMKM, penyaluran KUR telah memberikan kesempatan pada pengusaha untuk mengembangkan usahanya ke arah yang lebih besar.

2.5 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi landasan atau dasar dan acuan peneliti melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel II.4
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Metode Analisis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Analisis Pengendalian Intern Terhadap Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja (Studi Kasus pada PT. Bank Perkreditan Rakyat UMKM Jawa Timur Cabang Pacitan)	Putra, <i>et.al</i> (2016)	Metode Deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif	Pelaksanaan sistem dan prosedur dapat dinilai dari empat unsur pengendalian intern dan dilaksanakan dengan cukup baik namun masih terdapat beberapa yang kelemahan yaitu masih adanya perangkapan tugas yang dapat menyebabkan penyelewengan dan belum ada petugas penilai jaminan.
2	Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Bsd City	Putri (2017)	Metode Deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif	Pada implementasinya lebih mengedepankan tiga aspek yaitu karakter, kapasitas dan jaminan/agunan. Akan tetapi untuk pembiayaan KUR Mikro iB

				BRISyariah bank lebih terfokus pada aspek karakter dan kapasitas karena dalam produk ini agunan tidak diwajibkan, boleh saja memberikan agunan tapi tidak terikat dan diperbolehkan meski tidak mengcover seluruh jumlah pembiayaan.
3	Analisis Sistem Pengendalian Intern Dalam Pemberian Kredit Cepat Aman Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak	Sabarita (2010)	Metode Deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif	Hasil penelitian yang diperoleh adalah pemaparan evaluasi terhadap struktur organisasi meliputi pembagian wewenang dan tugas masing-masing bagian yang memisahkan fungsi operasi, akuntansi dan penyimpanan; evaluasi terhadap prosedur pemberian dan pelunasan KCA baik dari PT Pegadaian cabang pontianak atau UPC yang terkait prosedur dan wewenang yang dilakukan serta <i>flowchart</i> pemberian dan pelunasan KCA
4	Prosedur Sistem Pengendalian Internal Pada Prosedur Pemberian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Studi Kasus: PT. Pegadaian Cabang Depok Semarang	Nurjannah, <i>et.al</i> (2015)	Metode Deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif	Sistem pemberian kredit yang dilaksanakan oleh PT. Pegadaian Cabang Depok Semarang tersebut telah didukung oleh penerapan pengendalian internal cukup efektif, dan telah memenuhi sistem pengendalian internal yaitu ada dan dilaksanakannya prosedur pemberian kredit, lingkungan pengendalian, penafsiran risiko lebih ditingkatkan, aktivitas pengendalian dan pemantauan serta kurangnya otorisasi tiap devisi yang belum lengkap.

5	Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Usaha Desa Kepenuhan Barat	Pirdaus (2015)	Metode Deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa proses persetujuan kredit didominasi direktur dalam menentukan calon nasabah yang berhak memperoleh pinjaman, penentuan jumlah <i>plafond</i> kredit yang disetujui oleh pihak BUMDes Bina Usaha disesuaikan dengan jaminan calon nasabah, dan proses pencairan pinjaman menggunakan bukti transaksi berupa kuitansi disertai dengan Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K).
---	---	----------------	--	--

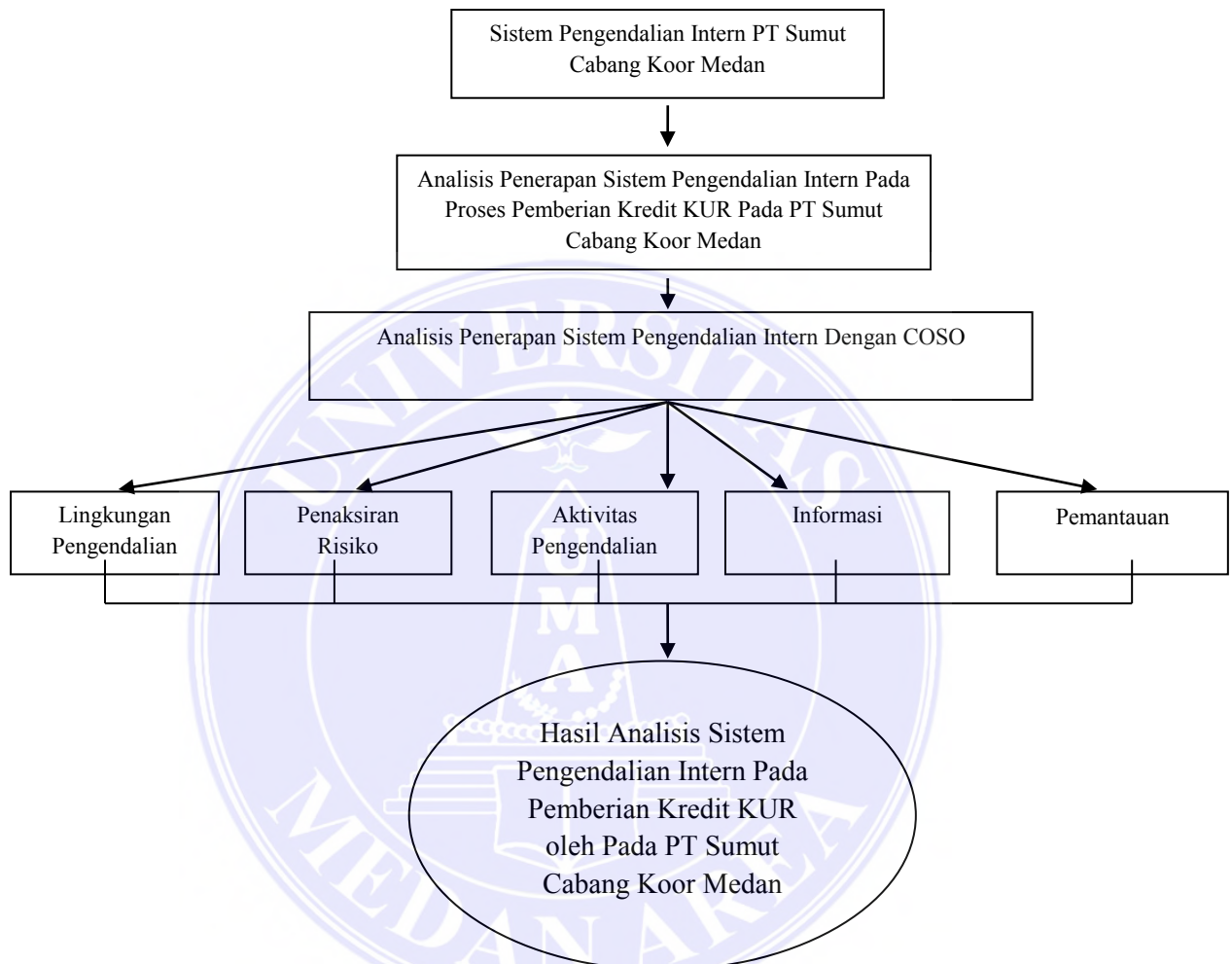
Sumber: Hasil olahan Penulis (2018)

2.6 Kerangka Konseptual

Kecenderungan peningkatan suku bunga bank menyebabkan pelaku usaha mikro kecil menengah dan masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi tidak mampu melunasi hutang-hutangnya pada pihak bank (Maryati, 2014). Oleh karena itu, masyarakat dan pelaku usaha berskala ekonomi mikro kecil dan menengah membutuhkan lembaga keuangan yang lebih mendukung pada keberhasilan usahanya dengan prinsip operasional yang didasarkan pada konsep syariah (Adilho dan Setyowati, 2014).

Untuk itu diperlukan sistem pengendalian internal sebagai dasar kegiatan operasional bank yang sehat dan aman dalam manajemen bank. Kebutuhan akan sistem pengendalian internal adalah suatu yang wajar, karena dengan adanya praktik pengendalian internal yang baik dapat merefleksikan adanya praktik manajerial yang baik (Putriandini, 2012). Mengingat bahwa sistem pengendalian internal merupakan kepentingan semua pihak yang saling terkait, yaitu pemilik

dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank, BI dan OJK selaku dari pembina dan pengawas bank, serta Pemerintah (Ayagre, Appiah, dan Nartey, 2014). Berikut ini adalah kerangka konseptual dalam penelitian ini:



Sumber: Hasil Olahan Penulis (2018)

Gambar II.1
Kerangka Konseptual Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian (Sanusi, 2011:13). Kualitatif yaitu berupa penggambaran keadaan secara naratif (kata-kata) apa adanya. Kualitatif ditujukan untuk penelitian bersifat kasus. Kualitatif sering digunakan untuk melihat lebih dalam suatu fenomena sosial, termasuk didalamnya kajian terhadap ilmu pendidikan, manajemen dan administrasi bisnis, kebijakan publik pembangunan ataupun ilmu hukum (Sanusi, 2011:14).

3.2 Lokasi & Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di PT Sumut Cabang Medan yang beralamat di Jl.Imam Bonjol No.18 Medan. Waktu penelitian akan diselenggarakan pada:

Tabel III.5
Rencana Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2018 – 2019						
		Jan	Feb-Mar	Apr-Jul	Juli	Ags-Nov	Des	Feb
1	Pengajuan Judul Skripsi	■						
2	Pembuatan Proposal		■					
3	Bimbingan Proposal			■				
4	Seminar Proposal				■			
5	Pengumpulan Data Dan Analisi data					■		
6	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi					■		
7	Seminar Hasil						■	
8	Sidang Meja Hijau							■

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2018)

3.3. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji penerapan atau perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah maka peneliti memutuskan informan pertama atau informan kunci yang paling sesuai dan tepat ialah Bagian Pemberian Kredit dan Operasional di Kantor Bank Sumut Cabang Koor Medan.

3.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Data Primer merupakan data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti (Sanusi, 2011:104). Sumber primer dilakukan melalui kegiatan wawancara langsung ke bagian-bagian yang terkait pada pengendalian intern pemberian kredit mikro dan kecil /KUR di Bank Sumut Cabang Koor. Medan.
- b. Data Sekunder merupakan data yang berasal dari perusahaan berupa bukti, laporan historis yang tersusum dalam arsip dan hal-hal berkenaan dengan materi pembahasan, yang berupa laporan-laporan data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari laporan yang tersedia pada perusahaan yang berhubungan dengan pengendalian intern atas pemberian kredit KUR.

3.5 Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Teknik Wawancara merupakan teknik pengumpulan data penelitian yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian (Sanusi, 2011:105). Dalam teknik wawancara ini dilakukan dalam bentuk tanya jawab secara langsung kepada bagian-bagian yang terkait didalam perusahaan tersebut yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengendalian intern pemberian kredit KUR.
- b. Observasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-

individu yang diteliti (Sanusi, 2011:111). Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada tempat penelitian terutama berkaitan dengan pengendalian internal yang dilakukan sehubungan dengan pemberian kredit KUR.

- c. Studi Kepustakaan. Teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan melalui bacaan yang berupa teori-teori yang bersumber dari buku-buku akuntansi berkaitan dengan permasalahan, selain itu dari karya ilmiah, *internet* dan sebagainya.

3.6 Teknik Analisis Data Penelitian

Teknik analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode analisis dengan mengumpulkan data yang ada, kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai suatu keadaan yang diteliti. Rumusan masalah yang membantu peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami situasi yang akan diteliti. Dalam hal ini bagaimana penerapan sistem pengendalian intern pada Bank Sumut Cabang Koor. Medan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap sistem pemberian kredit dan pengendalian intern yang dilakukan oleh Bank Sumut Cabang Koor Medan, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Komponen Pengendalian Internal pada bank Sumut Koor Medan sudah sesuai dengan 5 Komponen pengendalian Internal menurut Coso yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan, namun masih terdapat sedikit penyimpangan karyawan dalam lingkungan pengendalian, dimana sebagian karyawan dalam pelaksanaan kerja tidak sesuai dengan kode etik yang dibuat manajemen perusahaan. Dan Sistem pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank Sumut Cabang Koor Medan sudah sesuai dengan standar sistem pemberian kredit yang berlaku umum.
2. Penerapan sistem informasi akuntansi (aspek penting dalam pengendalian internal) yang diterapkan pada Bank Sumut Cabang Koor Medan pada prakteknya mempunyai beberapa komponen untuk mendukung kehandalan sistem informasi yang sesuai teori. Sistem Informasi Akuntansi pengendalian internal yang diterapkan Bank Sumut Cabang Koor Medan dalam hal penyaluran dana Kredit Usaha mikro dan Kecil/Multiguna jika dihubungkan dengan metode COSO sudah memadai

5.2 Saran

Penulis memberikan saran atau rekomendasi yang diharapkan dapat berguna bagi Bank Sumut Cabang Koor Medan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk sistem pengendalian internal pada prosedur penyaluran dana Kredit mikro dan kecil/Multiguna pada Bank Sumut Cabang Koor Medan sebaiknya diadakan kegiatan *review* secara rutin setelah kredit yang diberikan dari pihak manajemen Bank agar dapat meminimalisir resiko kredit yang terjadi.
2. Pengendalian intern pada sistem pemberian kredit di Bank Sumut Cabang Koor Medan harus mengikuti dan menyesuaikan dengan komponen pengendalian intern menurut standar COSO.
3. Komponen pengendalian intern yang belum diterapkan, sebaiknya dilakukan untuk memperlancar kegiatan di Bank Sumut Cabang Koor Medan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Abdul, Halim. 2015. *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Jilid 1. Edisi Kelima. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Agoes, Sukrisno. 2012 “*Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik*”, Jilid 1, Edisi Keempat, Salemba Empat, Jakarta.
- Arens, Alvin A. James L. Loebbecke. 2009, *Auditing Pendekatan Terpadu*, Terjemahan oleh Amir Abadi Yusuf, Buku Dua, Edisi Indonesia, Salemba Empat, Jakarta.
- Dendawijaya. 2008. *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia : Jakarta .
- Elder. *et.al*. 2013. *Auditing and Assurance Service : Integrated Approach, 14th Edition*, New Jersey: Printice Hall.
- Kasmir (2014). *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kuncoro. 2009. *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi Edisi Tiga*. Jakarta : Salemba Empat.
- Romney & Steinbart. 2004. “*Accounting Informasi Systems*”. Eighth Edition. Prentice-Hall.
- Sanusi, 2011, *Metode Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta
- Sugiyono (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2011. *Berpikir Kritis Dalam Auditing*. Salemba Empat, Jakarta.

Sumber Undang-Undang:

- Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 Tentang “Perbankan Indonesia”
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

Sumber Skripsi:

- Nurjannah, *et.al.* 2015. *Prosedur Sistem Pengendalian Internal Pada Prosedur Pemberian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Studi Kasus: PT. Pegadaian Cabang Depok Semarang.* Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Akuntansi Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Putri. 2017. *Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang BSD City.* Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Pirdaus. 2015. *Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Usaha Desa Kepenuhan Barat.* Jurnal. Universitas Pasir Pengaraian
- Putra, *et.al.* 2016. *Analisis Pengendalian Intern Terhadap Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja (Studi Kasus pada PT. Bank Perkreditan Rakyat UMKM Jawa Timur Cabang Pacitan)* .Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 39. Universitas Brawijaya Malang
- Sabarita. 2010. *Analisis Sistem Pengendalian Intern Dalam Pemberian Kredit Cepat Aman Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak.* Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP UNTAN.